

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PKL TERMINAL KRIAN KABUPATEN SIDOARJO (Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo)

DICKY RAHADIAN TRISNANTO

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This research aims to answer the question how the study of the implementation of the policy of relocating street vendors Krian Station areas and factors that affect the implementation of the policy carried out by the local government district of Sidoarjo. The background behind this research, based on the fact during 2007 and Sidoarjo district has been regulate street vendors who utilize around the station as the location of krian areas of effort. The action doesn't give you the right solution over the problem of street vendors in Sidoarjo in particular PKL Krian Station areas. After a sweeping, street vendors do the action which then push the Government to implement this policy.

To answer this question researchers used a method of the qualitative study with type research explorative. The selection of informants done purposively of sampling and next will grow by using snowball. Data is collected through the process of observation and in-depth interviews, as well as utilizing the document data and the tracing data online. The validity of the data tested through triangulation data so that the data being presented represents data that invalid. The analysis and interpretation data was undertaken with review all data that are available either obtained through in-depth interviews as well as the utilization of the document data then a grid, combined and grouped or are categorized and determining a series of entanglement the data. The results obtained from this conclusion show that the policies the relocation street vendors in arrangement place of business and guidance street vendors krian terminal has not run well. This result can be seen on the basis of the stages in the implementation of policies adhere to the local regulation no .07 1990 that still encounters many obstacles .In this research also looking at about a factor of factors affect the implementation of policy .Factors bureaucratic structure and resources are considered to be a contributing factor that impedes the implementation of a policy in the meantime , the support a group of a target that is positive is one factor that encourages the implementation of a policy .

Keyword : governance, policy implementation, relocation PKL of Krian Station

1.1 Latar Belakang Masalah

. Istilah pedagang kaki lima merupakan warisan dari zaman penjajahan Inggris, yang diambil dari ukuran trotoar (Sarjono, Yetty. 2005:47). Waktu itu yang dihitung dalam *feet* (1 *feet* = 31 centimeter) dan lebar trotoar pada waktu itu adalah lima *feet*.

Perhatian pemerintah lebih diutamakan dalam menangani tata ruang kota dan memperindah kota tanpa memikirkan

kepentingan masyarakat terutama PKL. Segudang permasalahan PKL antara lain:

- a. Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri
- b. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL
- c. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa.
- d. Ketiadaan perlindungan hukum terhadap PKL itu sendiri

e. Mobilitas sebagian PKL di satu sisi merupakan alat survival namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan (Suseno, Frans.2003:23)

Untuk mengatasi segudang permasalahan sektor informal yang dalam hal ini adalah PKL pemerintah saat ini gencar melakukan penataan PKL dengan alasan yang berbeda-beda. Bentuk penertiban sendiri setiap daerah mempunyai cara dan sudut pandang berbeda-beda salah satunya relokasi.

Sedangkan di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang menjadi lokus di dalam penelitian ini, dalam menangani problem Pedagang Kaki Lima pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat suatu produk hukum melalui landasan hukum penertiban dan pembinaan PKL Kabupaten Sidoarjo, antara lain yaitu peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Dan Pembinaan beserta dikeluarkannya SK.Bupati No. 188/733/404 1.1.3 2001 Tentang Pembentukan Tim Pembina Pedagang Kaki lima Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 didalamnya disebutkan bahwa dilarang berjualan di jalan umum dan jalur hijau. Dengan alasan untuk menciptakan suasana yang aman bebas dari kemacetan serta tidak mengganggu kegiatan kendaraan keluar masuk terminal dan menjaga keindahan kota

Untuk selanjutnya di dalam penelitian ini akan lebih membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Relokasi PKL Terminal Krian. Permasalahan di dalam penelitian ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena dalam penelitian ini ingin menggambarkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.

Dari penelitian diatas dan fakta yang ada ditengah masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti

tentang pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo dan Pengaturan tempat usaha bagi PKL Terminal Krian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Didalam penelitian ini juga akan membahas seperti apa kebijakan relokasi PKL tersebut dilaksanakan. Selain itu penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat permasalahan lambanya respon pemerintah didalam menghadapi kebijakan relokasi PKL.

I.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo?

I.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.

I.4. Manfaat penelitian

- Memperluas kajian pada khasanah Ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang implementasi kebijakan publik.
- Sebagai rujukan para peneliti di masa yang akan datang, khususnya para peneliti yang meneliti masalah-masalah yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian ini.
- Rujukan bagi para *Decision Makers* dalam mengambil suatu keputusan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Pedagang Kaki Lima.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.

Kerangka Teori

I.5.1. Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL

Sedangkan menurut Carl J. Frederick menyatakan:

“...Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Kebijakan dalam permasalahan ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini kebijakan publik adalah suatu pedoman yang mengarahkan tindakan yang mencakup tujuan, taktik dan

strategi untuk mencapai dan memungkinkan pelaksanaan secara nyata yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat baik yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan berupa pengalokasian nilai-nilai secara paksa yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

I.5.2. Implementasi kebijakan

Konsep implementasi yang didefinisikan oleh Sabatier – Mazmanian memberi tekanan pada sisi proses dan hasil serta dampak kebijakan :

“...Di dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa”.

Sedangkan definisi dari implementasi menurut Van Horn dan Van Meter adalah :

“...Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu-individu pribadi atau kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Termasuk dalam aktivitas ini adalah usaha untuk mentransformasikan keputusan kebijakan ke tahap operasional dan usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil”. (Dennis Sabatier dan Mazmanian, 1975:447)

Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa konsep implementasi dapat diterangkan dari sisi hasil (Sabatier –

Mazmanian), dari sisi proses (Van Meter dan Van Horn) yaitu suatu aktivitas pelaksanaan kebijakan, dari sisi akibat atau hasil dari penerapan kebijakan, dan dari segi fungsional (Grindle) suatu kebijakan.

. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang PKL di wilayah pemerintah kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Sidoarjo No.7 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam konteks penelitian ini Implementasi Kebijakan adalah serangkaian aktivitas fungsional oleh individu/kelompok aktor pemerintah maupun masyarakat yang saling terkait dalam upaya menterjemahkan dan melaksanakan kebijakan yang dibuat.

I.5.3. Model-model implementasi Kebijakan

Merille S. Grindle menyatakan bahwa implementasi hanya dapat dimulai bila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah uraikan dan dijabarkan ke dalam program tindakan. Aktivitas penerapan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel yang dapat dibagi menjadi content (isi), yang terdiri dari enam variabel, yaitu : 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 3) Derajat perubahan yang diinginkan. 4) Kedudukan pembuat kebijakan. 5) Siapa pelaksana program. 6) Sumber daya yang dikerahkan. Dan *context* dari kebijakan, terdiri dari : 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 2) Karakteristik lembaga dan penguasa. 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, kelompok sasaran, pengusaha dan para pelaksana program akan bersama-sama mempengaruhi efektivitas

implementasi. (Abdullah, Muhammad Syukur. 1988:17)

Model lain adalah model yang dikembangkan oleh D. Van Meter dan C. Van Horn, yang menyakini ada enam variabel independen yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan : 1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan. 2) Sumber daya. 3) Aktivitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan. 4) Karakteristik agensi pelaksana. 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. 6) Disposisi dari pelaksana. Model ini memiliki keterbatasan untuk program yang bertujuan mendistribusikan barang dan jasa pelayanan publik dan terlalu abstrak, dengan kategori yang tidak jelas bentuknya serta variabelnya sulit dioperasionalkan. (Wibowo, Samudra dkk.1994:22)

George C. Edward III dalam uraiannya tentang “Implementing Public Policy” merumuskan keempat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat penting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat variabel tersebut adalah :

1. Komunikasi
2. Sumber daya : Meliputi; 1) Staf yang cukup (jumlah dan mutunya) 2) Informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan. 3) Kewenangan atau authority yang cukup dalam melaksanakan tanggung jawab. 4) Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

(Abdullah, Muhammad Syukur. 1988:13)

Warwick menyatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

proyek yaitu : a) faktor pendorong/*facilitating conditions*, dan b) faktor penghambat/*impeding conditions*. Dalam implementasi kebijakan faktor-faktor itu selalu berpengaruh meski masing-masing faktor berbeda besar pengaruhnya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kondisi-kondisi atau faktor pendorong, menurut Warwick, faktor-faktor yang mendorong implementasi terdiri dari :
 - a. Komitmen pimpinan politik :
 - b. Kemampuan organisasi :
 - c. Kemampuan organisasi (*Standart Operation Procedure*),
 - d. Komitmen para pelaksana (Implementers)
 - e. Dukungan dari kelompok kepentingan.
 2. Kondisi-kondisi atau faktor penghambat, adapun faktor-faktor yang secara teoritis dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yaitu :
 - a. Banyaknya aktor yang terlibat
 - b. Terdapat komitmen atau loyalitas ganda
 - c. Kerumitan yang melekat pada kebijakan itu sendiri (*instrinsik complexity*)..
 - d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak
 - e. Waktu dan perubahan kepemimpinan
- Peneliti akan mengacu pada model-model implementasi kebijakan diatas dan mencoba untuk mengelaborasi model-model tersebut untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengaturan PKL dalam hal ini Perda nomor 7 tahun 1990.

1.5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Penelitian ini menggunakan model Edward yang meyakini ada empat faktor yang selalu mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu struktur

birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan sikap pelaksana. Hal ini mengingat *pertama* model tersebut dianggap mempunyai kesesuaian untuk diterapkan pada pelaksanaan kebijaksanaan dinegara-negara sedang berkembang. *Kedua* variabel-variabel yang terdapat didalamnya memiliki daya *explanatory power* yang cukup tinggi terhadap proses implementasi. *Ketiga* model tersebut variabel-variabelnya merupakan *critical variables* yang mudah dioperasionalkan dalam penelitian empiris dan karena teori ini yang paling cocok digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan, dan memang terlihat sering mempengaruhi proses implementasi. (Abdullah, Muhammad Syukur. 1988:39)

Variabel-variabel implementasi kebijakan yang akan digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan penataan dan pembinaan PKL terminal Krian kabupaten Sidoarjo antara lain :

I.5.4.1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat Edward, dimana menurut Edward, struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu *standart operating procedures* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksana kebijaksanaan. Dalam SOP ini perlu dihindari munculnya “fragmentation” yang sering terjadi dalam suatu organisasi-organisasi, namun hal ini bisa diatasi melalui mekanisme koordinasi. (Abdullah, Muhammad Syukur. 1988:14)

I.5.4.2 Komunikasi

. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh dalam proses kebijakan karena koordinasi antar instansi komunikasi memegang

peranan yang penting dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. (Sabatier, Dennis dan Mazmanian. 1987:479)

Dalam implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Satpol PP tentu memiliki pandangan organisasi yang berbeda. Dengan demikian rentan pada timbulnya fragmentasi.

Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi antara beberapa bagian/komponen yang terdapat di dalamnya. Menurut Alwi Dahlan proses tersebut berjalan dari komunikator yang menyampaikan pesan (*message*) melalui jalur tertentu (*media*) kemudian pesan tersebut ditangkap oleh penerima (*receiver*) dan bila memungkinkan menjadi umpan balik (*feed back*).

I.5.4.3. Sumber Daya

Yang dimaksud sumber daya dalam pengertian Edward disini adalah meliputi sumber daya fisik (fasilitas), administratif (jumlah staf dan kompetensinya), informasi dan kewenangan (*Authority*). Sedangkan Grindle menyatakan *implementation failures* program-program pembangunan yang pada kenyataannya seringkali disebabkan oleh kelangkaan sumber daya.

Dalam kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL kecukupan staf/aparat pelaksana baik jumlah maupun keahliannya sangat dibutuhkan karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

I.5.4.4. Sikap Pelaksana

Signifikansi faktor sikap dan watak para pelaksana dalam proses implementasi ditegaskan oleh Edward sebagai :

“Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan”. (Briant, Coralie dan white. 1987:159)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL ini tentunya tidak mengabaikan aspek sikap akan kecenderungan dari pelaksana yang ada.

I.5.4.5. Dukungan Kelompok Sasaran

Dukungan kelompok sasaran meliputi dua hal, yaitu penolakan dan dukungan.

Sedikitnya ada tiga manfaat yang diinginkan oleh suatu kelompok sasaran bila mereka menaati kebijakan :(1). Keuntungan material, yaitu kebutuhan pribadi yang paling pokok, (2) Keuntungan sosial, yaitu kebutuhan publik/kelompok yang paling pokok, dan (3) Keuntungan personal, yaitu berkaitan dengan keinginan yang diperoleh secara individual dalam melibatkan diri sebagai anggota kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan politik dan sosial dalam operasionalisasi kebijakan.

I.6. Definisi Konsep

1. Implementasi kebijakan adalah suatu proses tindakan administrasi dan politik, dimana didalamnya dapat ditunjukkan melalui bagaimana para aktor terlibat dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan.
2. Implementasi kebijakan pengaturan pedagang kaki lima adalah suatu usaha pengejawantahan dari kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, yaitu dengan merelokasi PKL terminal Krian.
3. Struktur birokrasi adalah suatu sistem atau SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi adalah upaya untuk membentuk kesamaan atau kesepakatan antara komunikator dan komunikan mengenai pandangan
5. Sumber daya adalah sumber daya fisik, kecukupan aparat pelaksana dan kewenangan.
6. Sikap pelaksana adalah sejauhmana unit atau sikap para pelaksana kebijakan melaksanakan tugas-tugasnya secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Dukungan kelompok sasaran adalah menyangkut preferensi kelompok sasaran terhadap kebijakan yang mengatur aktivitas mereka.

I.7. Rincian Perolehan Data

I.7.1 Implementasi Perda No. 07 tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL di Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo

I. Perda No. 07 tahun 1990 Kabupaten Sidoarjo

- Fenomena yang melatarbelakangi
- Tujuan Utama implementasi Perda No. 07 tahun 1990
- Instrumen Program yang digunakan
- Agen – agen pelaksana program beserta peranannya

II. Sosialisasi implementasi Perda no. 07 tahun 1990 kepada kelompok sasaran :

- Tujuan sosialisasi
- Lembaga yang melakukan sosialisasi
- Waktu dan media yang dibutuhkan untuk sosialisasi
- Substansi sosialisasi

I.7.2. Faktor - Faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 07 tahun 1990

I. Komunikasi

- Jaringan komunikasi antar pelaksana
- Media komunikasi yang digunakan
- Kejelasan petunjuk dan perintah pelaksanaan
- Konsistensi petunjuk dan perintah pelaksanaan

II. Sumber Daya

a. Sumberdaya Manusia

- Kualitas staf pelaksana yang tersedia (keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan program)

b. Sumberdaya Informasi

- Ketersediaan dan kecukupan informasi tentang pelaksanaan program
- Kendala dalam transformasi informasi

- c. Sumberdaya kewenangan
 - Kewenangan masing masing instansi pelaksana
 - Kewenangan yang cukup dan jelas bagi tiap – tiap staf dalam mengimplementasikan program
 - Kemampuan dan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- d. Sumberdaya Anggaran
 - Kecukupan dan kelancaran anggaran yang dibutuhkan

III. Disposisi Pelaksana

- Pemahaman aparat pelaksana terhadap pelaksanaan program
- Arahan dan tanggapan aparat pelaksana terhadap kebijakan atau program
- Kemauan dan kemampuan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan maupun program

IV. Struktur Birokrasi

- Prosedur kerja dan pengaturan mekanisme kerja pelaksanaan kebijakan ataupun program
- Perubahan dalam prosedur kerja dan pengaturan mekanisme kerja pelaksanaan kebijakan ataupun program

V. Dukungan Kelompok Sasaran

- Mekanisme Perda No 7 tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL
- Kegiatan sosialisasi
- Manfaat dari Perda no 7 tahun 1990
- Kendala yang dialami

- Pandangan terhadap perda no. 7 tahun 1990

I.8. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan taksiran mereka tentang fenomena tertentu di sekitarnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ialah instrumen utama. Penelitian kualitatif tidak memerlukan kuesioner sebagai instrumen, tetapi menghendaki peneliti itu sendiri yang berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk melakukan kegiatannya sendiri di lapangan.

I.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif.

Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. (Suryabrata, Sumadi.2006:76)

Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti yaitu terutama mengenai pelaksanaan kebijakan relokasi PKL

I.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini mengambil tempat Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan asumsi peneliti terhadap realita yang mungkin nampak di lapangan dengan realita yang ada secara administratif dan mendesaknya kebijakan yang harus ditangani.

I.8.3. Teknik Pemilihan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik cara *purposive sampling*, dimana informan yang hendak dipilih adalah pihak yang dianggap paling memahami dan mengetahui tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya berkembang dengan menggunakan teknik *snowball*, dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka penggalan data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas rekomendasi dari informan utama yang telah ditentukan sebelumnya melalui teknik *purposive sampling*.

I.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari cara memperoleh data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Observasi.
2. Wawancara Mendalam.
3. Dokumentasi

I.8.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Moleong mendefinisikan teknik Triangulasi sebagai “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan segala sesuatu yang lain di luar data yang telah diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Dalam penelitian ini proses triangulasi yang dilakukan adalah proses triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.

I.8.6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data adalah:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

II.1. Keadaan Geografis Kabupaten Sidoarjo

batas – batas administrasi Kabupaten Sidoarjo adalah :

- a) Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b) Sebelah Timur : Selat Madura
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

II.2 Keadaan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 sebanyak 1.945.252 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 24,45% dari Sensus Penduduk tahun 2010 atau sebanyak 382.237 jiwa.

II.2.1 Komposisi Penduduk Menurut Usia

Komposisi umur anak (0 – 14 tahun) sebesar 25,58 % (dibawah 40 %) dan umur tua (65+ tahun) sebesar 4,12 % (dibawah 10 %). Komposisi umur produktif (15 – 64 tahun) sebesar 30 %

II.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Diketahui bahwa mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sidoarjo sebagian besar adalah sebagai tenaga kerja di bidang industri pengolahan sebanyak 301.432 jiwa dengan prosentase 33.22% . Mata pencaharian penduduk terbesar kedua adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 232.902 jiwa atau 25,67%. Besarnya tenaga kerja di sektor industri maupun sektor perdagangan menjadi indikator bahwa terjadi perkembangan yang pesat terhadap sektor informal di Kabupaten Sidoarjo.

II.3 Sektor Informal

Sektor informal adalah suatu unit kegiatan usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri.

II.3.2 Profil Karakteristik Lokasi PKL Sekitar Terminal Krian Sidoarjo

Jl. Dr. Setiabudi adalah merupakan jalan utama yang mengelilingi kawasan Terminal Krian. Ruas jalan itu menjadi satu bagian area yang dibuat berjualan oleh para pedagang yang berjualan disekitar Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.

Pada awalnya lokasi tersebut merupakan kawasan pasar dadakan yang ada pada hari Minggu saja. Namun seiring perkembangannya kawasan ini menjadi kawasan PKL yang beroperasi setiap harinya mulai pukul 05.00 – 20.00.

Pada saat ini kawasan Jl. Dr. Setiabudi menampung lebih dari 70 PKL. Jumlah ini akan lebih meningkat pada hari – hari besar dan hari Minggu. Jumlah PKL pada saat ini diperkirakan juga akan bertambah karena mengingat PKL tidak hanya dari Sidoarjo saja namun juga penduduk pendatang dari daerah lain.

Pada umumnya para pedagang yang berjualan di kawasan ini menawarkan burung, ayam, serta sayur-sayuran sebagai barang dagangannya. Jika sore hari ada yang menjual kaset VCD/DVD serta makanan.

II.3.3 Karakteristik PKL Dalam Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo

Kepadatan PKL pada lokasi ini sekitar 1 jiwa/m² dengan pemanfaatan fasilitas publik berkisar kurang lebih 6-8 m². Di lokasi Terminal Krian keragaman jenis aktivitas adalah penjual barang dan jasa dengan skala kecil hingga menengah. Komoditas yang dijual berupa makanan dan

minuman, sayuran, VCD, rokok, kacamata dan lain sebagainya.

III. 1 Penyajian dan Analisis Data

III.1.1 Implementasi Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

III. 1. 1. Pengaturan Tempat Usaha.

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Kebijakan Penertiban Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebuah upaya pembinaan PKL di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi penentuan lokasi dan membentuk sentra-sentra lokasi bagi PKL, penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL yang memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya. Dalam hal penentuan lokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo memang tidak dipersiapkan suatu lahan khusus bagi PKL tanpa izin kepala daerah, karena mereka termasuk pada sektor perdagangan informal.

Tempat yang nantinya dijadikan pertimbangan dan digunakan untuk PKL dalam pembuatan kebijakan ini merupakan tempat yang strategis dan benar-benar potensial, karena diharapkan tempat yang baru dapat digunakan untuk jangka panjang atau permanen, PKL disana diminta untuk pindah yang berujung pada munculnya kebijakan Penertiban tempat usaha dan pembinaan PKL untuk merelokasi PKL Terminal Krian ke tempat yang lebih layak yakni di dalam terminal Krian.

III. 1. 2. Pembinaan.

Berdasarkan Perda No 07 tahun 1990 untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan usaha pedagang kaki lima.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Sidoarjo selaku instansi yang berkepentingan dengan perdagangan dan UKM di kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini pemberian pembinaan PKL juga melibatkan Satpol PP, sebagai instansi pendukung dalam menangani PKL di Kabupaten Sidoarjo. Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Disperindagkop dan dibantu oleh Satpol PP sudah berjalan yang sedikitnya telah mengadakan studi banding dengan PKL dalam salah satu bentuk pembinaanya. selain itu aparat juga melakukan penyuluhan dan arahan kepada PKL mengenai aturan-aturan dan sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan.

III. 1. 3. Ketentuan Perizinan.

Para PKL yang ingin mendapatkan izin harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Adapun berdasarkan Perda no 07 tahun 1990, izin dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk izin usaha, melainkan juga izin dalam hal penggunaan fasilitas umum yang digunakan untuk berjualan PKL. Permohonan ini nantinya akan ditujukan kepada Disperindagkop, PKL yang menjadi kelompok sasaran yaitu PKL Terminal Krian sudah mengurus ijin ke aparat pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk tanda paguyuban dari aparat.

Dari sini dapat dilihat bahwa untuk perijinan dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan, namun masih memiliki kendala dimana PKL merasa bahwa ada atau tidaknya ijin usaha, bagi mereka sama saja karena menurut PKL, mereka dapat ditindak sewaktu-waktu oleh aparat. Oleh karena itu masih banyak PKL yang menghiraukan perijinan baik dalam hal ijin usaha maupun ijin lokasi yang digunakan. Tidak heran jika

saat ini masih banyak PKL dari dalam terminal Krian yang masih kembali ketempat semula meskipun sudah ditertibkan.

III. 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL Terminal Krian kabupaten Sidoarjo.

III. 2. 1. Struktur Birokrasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur birokrasi, telah menyatakan tentang aparat yang mempunyai wewenang dan keterkaitan dengan kebijakan Pengaturan Tempat usaha dan pembinaan PKL.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut maka Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten Sidoarjo selaku instansi yang mempunyai tupoksi dan wewenang. Adapun intansi terkait yang membantu tugas Dinas Perdagangan perindustrian dan koperasi adalah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
2. Badan perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kelurahan dan Kecamatan Setempat.

III. 2.2 Sumber Daya

Suatu kebijakan betapun telah dirumuskan dengan baik akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang memadai maka akan sulit diimplementasikan. Lebih jauh lagi sebuah keberhasilan pelaksanaan program sangat tergantung pada sejauh mana sumber daya yang ada dapat memadai dan dioptimalkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada. Termasuk dalam kebijakan pengaturan tempat usaha dan

pembinaan PKL Terminal Krian ini. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan PKL Terminal Krian dalam penelitian ini meliputi sumber dana, ketersediaan aparat pelaksana baik dari segi jumlah maupun kompetensinya dan kewenangan.

III. 2. 2. 1. Ketersediaan dan kecukupan dana

Sumber daya dalam implementasi kebijakan Pengaturan Tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan baik operasional maupun untuk pembinaan PKL. PKL belum mengetahui mengenai alokasi dana yang digunakan untuk pendanaan Kebijakan ini dan mereka berharap agar pemerintah dapat memaksimalkan apabila ada alokasi dana yang memang diperuntukkan untuk pelaksanaan kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian.

Diketahui bahwa dana program PKL berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk program pengaturan tempat usaha dan Pembinaan PKL Terminal Krian di Kabupaten Sidoarjo.

III. 2. 2. 2. Kecukupan Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL di Sidoarjo, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL ini diantaranya beberapa instansi yang bertanggung jawab yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan dan koperasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Satpol PP, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hal tersebut masih mengalami kendala yakni belum terbentuknya satuan kerja antar aparat yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL ini.

III. 2. 2. 3. Kewenangan

Kewenangan dari pembuat peraturan diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Peneliti melihat bahwa kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi dalam menangani PKL di kabupaten Sidoarjo. Hal ini karena masih belum ada instansi yang benar-benar khusus mempunyai wewenang untuk menangani kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian, sehingga instansi yang ditunjuk untuk menangani kebijakan ini hanya mengandalkan wewenang yang dimilikinya yang sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing.

Pengatur tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian adalah :

1. Dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi daerah sebagai instansi yang ditunjuk sebagai coordinator dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai aparat yang bertugas untuk memberikan pembinaan dan penertiban.
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai instansi yang mengelola lokasi yang diberikan ijin untuk dimanfaatkan oleh PKL.

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan umum dalam pelaksanaan kebijakan.

III. 2. 3. Komunikasi

Pemerintah menjalin komunikasi dengan para PKL terminal Krian dalam bentuk sosialisasi program dan pembinaan PKL. Komunikasi yang dilakukan juga mengikutsertakan para PKL dalam kajian studi banding yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan ini. Perwakilan PKL Terminal Krian dilibatkan dalam studi banding itu untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pengaturan tempat usaha dan penataan PKL agar selalu terjalin komunikasi antara aparat dan kebijakan tidak berjalan sepihak. Komunikasi yang dilakukan pelaksana terkait sudah berjalan meski masih ada kendala seperti belum adanya tindak lanjut dari apa yang telah dikomunikasikan antar aparat maupun dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah PKL Terminal Krian. Selain itu berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa dalam tubuh instansi pemerintah saling terjadi pelemparan tanggungjawab didalam komunikasi dengan pihak luar. Hal ini menyebabkan penataan PKL sedikit terhambat karena kurang lancarnya alur komunikasi dalam pelaksanaan Pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian. penataan PKL selalu terhambat oleh susahny komunikasi antara pelaku didalamnya, baik horizontal antar instansi maupun vertikal dengan kelompok sasaran.

III. 2. 4. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini tentunya tidak mengabaikan aspek sikap akan kecenderungan dari pelaksana yang ada. Kecenderungan dan sikap pelaksana

yang positif yaitu mereka menerima dan tidak menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Bisa dikatakan disposisi adalah motivasi psikologis melaksanakan kebijakan dari aparat pelaksana kebijakan. Termasuk dalam hal ini pembahasan tentang sikap pelaksana akan mencakup penilaian terhadap keberadaan kelompok sasaran (PKL) di daerahnya dan yang kedua adalah kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan kebijakan.

Kemauan dan komitmen para aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Realitasnya pelaksana memiliki kekuasaan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan metodenya sendiri. Pengetahuan dan Pemahaman aparat pelaksana terhadap program menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan Pengaturan tempat usaha. Sebagian besar aparat pelaksana maupun dari instansi yang berkompeten bertanggung jawab kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL merupakan kebijakan yang baik dan mendapat tanggapan positif dari aparat pelaksana kebijakan tersebut, karena dengan adanya kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian akan tertata rapi dan fasilitas umum juga tidak akan terganggu oleh kehadiran PKL yang dinilai merusak keindahan tata ruang kota. Selain itu dengan adanya kebijakan ini aparat pelaksana kebijakan ingin memajukan sektor perekonomian melalui sentra PKL yang nantinya akan dijadikan kawasan wisata PKL.

III. 2. 5. Dukungan Kelompok Sasaran.

Dalam implementasi kebijakan Pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian ini memerlukan dukungan aktif masyarakat. Suatu kebijakan atau program tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari kelompok sasaran. Dilihat dari tanggapan kelompok sasaran

terhadap kebijakan dalam implementasi Pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian, aparat pelaksana merasa bahwa kelompok sasaran mempunyai inisiatif untuk mendorong terlaksananya kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL. Hal ini terlihat dari awal penertiban yang dilakukan yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima untuk dipindahkan dan kemudian melakukan perlawanan dalam bentuk protes kepada pemerintah. Tetapi kemudian setelah terjadi interkasi dan negosiasi dengan pemerintah pada akhirnya ditemukan jalan tengah bagi kedua belah pihak. Dari uraian tersebut dapat dilihat peran dari kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Peran serta dukungan kelompok sasaran terhadap kebijakan Pengaturan tempat usaha dan Pembinaan PKL Terminal Krian sudah cukup baik dengan adanya respon positif dari PKL.

IV. 1. Kesimpulan

IV. 1. 1. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.

- Pengaturan tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini berdasarkan peraturan daerah no 07 tahun 1990 tempat yang dimanfaatkan oleh PKL adalah fasilitas umum yang mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah..
- Mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada respon dari kelompok sasaran yang ikut aktif.
- Dalam pelaksanaan Kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL Terminal Krian

Kabupaten Sidoarjo untuk ketentuan perijinan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih adanya tindakan penertiban dari pemerintah yang menertibkan PKL meski sudah punya ijin.

IV. 1. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo.

Faktor – faktor :

- Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur.
- Sumber daya dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima Terminal Krian secara keseluruhan masih belum memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini. Ketersediaan alokasi sumber dana yang terbatas masih menjadi kendala, selain itu dari segi kewenangan, aparat sudah mempunyai komitmen dalam menjalankan kebijakan ini namun masih terkendala adanya alur birokrasi yang menghambat wewenang yang dimiliki oleh aparat pelaksana.
- Mekanisme komunikasi pada lembaga pelaksana dan instansi pendukung kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, adanya interaksi antara pemerintah dengan PKL sudah cukup bagus

- Sikap pelaksana sudah amat tanggap. Baik ditingkat instansi utama maupun pendukung dan aparat pelaksana dilapangan umumnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terhadap kebijakan
- Dukungan kelompok sasaran sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo. Respon kelompok sasaran terhadap kebijakan relokasi dapat dikatakan cukup positif dengan ikut aktifnya PKL dalam pembinaan yang dilakukan oleh aparat pelaksana. Walaupun sempat terjadi ketegangan dalam relokasi, namun dapat diatasi

dengan negosiasi antara aparat dengan kelompok sasaran.

IV. 2. Saran

1. Perlu menetapkan institusi khusus yang menangani PKL. Agar tupoksi jelas.
2. Perlu dijalin komunikasi yang selaras antara PKL dengan pemerintah daerah, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antara PKL dengan pemerintah.
3. Dicari jalan terbaik tentang lokasi berdagang yang baru,
4. Diperlukan adanya penindakan tegas terhadap pelanggaran yang disetujui oleh kedua belah
5. Perlu disusunnya regulasi/peraturan yang lebih mendetail

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. "Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara", Jakarta.
- Alisjahbana. 2005. "Sisi Gelap Perkembangan Kota", LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Dennis Sabatier dan Mazmanian. 1975. "Implementation and Public Policy", Jakarta.
- Islami, Irfan .1989. Materi Pokok Kebijakan Publik, Modul Universitas Terbuka, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2000. "Metode Penelitian Kualitatif", Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Nasution , M. Zein, dkk, 1989. "Lokakarya Penelitian Sektor Informal", Jakarta.
- Priyono, Edy. 2002. "Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum", Bekasi.
- Sarjono, Yetty. 2005. "Pergulatan Pedagang Kakilima Di Perkotaan", Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syukur Abdullah, Muhammad. 1988. "Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)," dalam Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan, LAN, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1993. "Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara", Rajawali Press, Jakarta.
- Wibowo, Samudra dkk, 1994. "Evaluasi Kebijakan Publik", Grafindo Persada, Jakarta